

**PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN CALON JAMAAH HAJI
DILAKUKAN UNTUK Mencari Keuntungan Oleh “SI” Dalam
Membuat Palsu Paspor dan Membawa Berangkat
Bersama Ibadah Haji Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Mochammad Ridwan

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah perbuatan SI yang memalsukan dokumen kependudukan AF dan RO untuk mendapatkan paspor dan membawa berangkat ibadah haji dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Mengubah dokumen kependudukan calon jemaah haji, namun sebelum berangkat haji meninggal dunia, diganti nama dan foto orang lain. Memanipulasi dokumen kependudukan digunakan pengurusan pembuatan paspor yang diperlukan sebagai persyaratan pemberangkatan ibadah haji. SI berjanji akan mendampingi berangkat haji bersama, namun karena paspor tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dokumen untuk keluar wilayah Indonesia. Penerbitan paspor yang berarti tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dokumen untuk keluar wilayah Indonesia, pelaku telah dikenakan Pasal 263 KUHP dan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian karena keseluruhan unsurnya terpenuhi. Pelaku melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 263 KUHP dan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Kata Kunci: Dokumen Palsu, Calon Jemaah Haji, Keimigrasian

**FORGERY OF RESIDENCE DOCUMENTS OF PROSPECTIVE
PILGRIMS IS DONE TO SEEK PROFIT BY “SI” IN MAKING FAKE
PASSPORTS OF PILGRIMS AND DEPARTING WITH THE
PILGRIMAGE BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING
IMMIGRATION**

Mochammad Ridwan

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this thesis is to find out whether the act of SI which falsified population documents AF and RO to obtain a passport and to take the pilgrimage can be convicted under the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The conclusions are as follows: Change the residence documents of prospective pilgrims, but before leaving the pilgrimage dies, the names and photos of other people are changed. Manipulating population documents is used to arrange passports that are needed as a condition of hajj departure. SI promised to accompany the pilgrimage together, but because the passport was not valid and could not be used as a document to leave the territory of Indonesia. Issuance of passports which means illegitimate and cannot be used as documents to leave the territory of Indonesia, the perpetrators have been subject to Article 263 of the Criminal Code and Article 120 paragraph (1) of the Immigration Law because all the elements are fulfilled. The perpetrator commits an act violating two laws and regulations, namely Article 263 of the Criminal Code and Article 120 paragraph (1) of the Immigration Act, according to Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code, that if an act falls in more than one criminal rule, only one among those rules; if different, what is imposed includes the most severe threat of principal

Keywords: Fake Documents, Hajj Pilgrims Candidates, Immigration